

## Prinsip Prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara

Aprilia Puspasari

Universitas Bina Sarana Informatika  
aprilialp@bsi.ac.id

*Abstract – Multi-dimensional crisis in Indonesia, among others, one of which is caused by procedures of governance that is not properly managed and regulated. Consequently arise various problems such as corruption, collusion and nepotism (KKN). Good governance (good governance) is a conception of clean governance, democratic, effective and appropriate contribution, empowerment, and the balance between the three pillars (government, private businesses, and communities). Governmental organizations should be able to compete with private businesses in managing their resources, so that the necessary preparedness of government agencies to implement good governance such as accountability and transparency. The research method used in this journal analyze the effect of transparency and accountability for that is part of the principles of good governance, research analysis techniques include test validity is a stage where the gauges can measure what should be measured, so that a study using the questionnaire as its validity needs to be tested empirically. Reliability test is performed to measure the consistency of constructs or variables. A questionnaire said reliable or reliable if a person answers to the statement are consistent or stable over time. Normality test data is performed to determine whether the data were normally distributed or not. And regression test to see the relationship of the independent variables and the dependent variable significantly. Statistical analyzes were performed showing the discovery: the correlations table looks great with the accountability relationships between variables were calculated with the transparency of the correlation coefficient is 0.073, Theoretically, the variable transparency has no effect on accountability.*

**Key words:** Good Governance, Transparency, and Accountability .

### I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai objek investasi yang sangat menarik menjadi daya pikat bisnis internasional, sedangkan di dalam negeri sendiri kita dihadapkan pada permasalahan korupsi yang tak berujung, permasalahan politik yang menjadi benang kusut, dan permasalahan lain, krisis multi dimensi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal yang berdampak pada kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap kewajiban dalam memenuhi aturan pemerintah menjadi berkurang.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara ketiga pilar (pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat). Organisasi pemerintah harus mampu bersaing dengan dunia usaha swasta dalam mengelola sumber dayanya dengan tujuan akhir adalah pengguna layanan. Objek para investor yang akan menanam saham di Indonesia ini adalah suatu hal yang menarik untuk pemasukan pajak pada negara. Sehingga sumber pendapatan negara semakin besar, untuk pencapaian ini diperlukan kesigapan aparat pajak dalam menerapkan *good governance* diantaranya akuntabilitas dan transparansi agar kepatuhan wajib pajak dapat terlaksana dengan baik sesuai anggaran, sehingga negara bisa menerima pemasukan pajak dari masyarakat dengan maksimum untuk kemakmuran rakyat.

Prinsip-prinsip Good Governance pada dasarnya merupakan prinsip yang saling terkait dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dalam mewujudkan good governance. Di antara ke-sepuluh prinsip terdapat prinsip yang berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya dan ada pula prinsip yang merupakan prakondisi agar prinsip yang lain dapat berjalan. Pada kenyataannya, sulit untuk menerapkan semua prinsip sekaligus. Oleh karena itu perlu dilakukan pemrioritasan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip atau karakteristik good governance tersebut agar good governance dapat terwujud pada berbagai bidang pembangunan. (CUI-ITB, 2004)

Laporan tentang GCG Oleh CLSA (2003), menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum, 2,5 untuk mekanisme institusional dan budaya corporate governance, dan dengan total 3,2. Meskipun skor Indonesia di tahun 2004 lebih baik dibandingkan dengan 2003, kenyataannya, Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di antara Negara-negara Asia. Faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya corporate governance yang masih berada di titik paling rendah di antara Negara-negara lain yang sedang tumbuh di Asia. (Kaihatu, 2006)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak dan dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Untuk mewujudkan hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan reformasi perpajakan yang salah satunya melalui program modernisasi administrasi perpajakan di seluruh kantor Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara bertahap, dalam mewujudkan pencapaian *good governance*. (Sadhani, 2005)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2004)

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2004)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran negara. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pajak dipungut untuk dikembalikan ke rakyat melalui pengeluaran-pengeluaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Manfaat pajak sangat strategis, sebagai urat nadi kehidupan bangsa. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang baik yaitu: keadilan (*equity*), kemudahan (*simple and understandable*), waktu dan biaya yang efisien bagi institusi maupun Wajib Pajak, distribusi beban pajak yang lebih adil dan logis, serta struktur pajak yang dapat mendukung stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu reformasi modernisasi dan birokrasi yaitu keberadaan Kanwil Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar (LTO) dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dibentuk dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern berlandaskan *case management*. (Sadhani, 2005)

Dikutip dari (Sutedjo, n.d.) “Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah”, Prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Transparansi dan Akuntabilitas.

Ditengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. *Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi.

*Good Governance* menurut Bank Dunia (*World Bank*) adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (*The way state power is used in managing economic and social resources for development of society*)

Secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan

rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2012)

Menurut (Muhammad, 2007) Setiap perusahaan atau entitas usaha harus memastikan bahwa prinsip *good governance* diterapkan pada setiap aspek. *Good governance* dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai *principal*, dengan manajemen sebagai agen.

*Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *good governance* dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing Negara. Prinsip-prinsip OECD mencakup transparansi, tanggung jawab, keadilan dan akuntabilitas. Transparansi yaitu mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan. Tanggung jawab adalah kesesuaian dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan adanya kesesuaian di dalam pengelolaan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak diantara para *stakeholders* yang terkait dengan organisasi. Akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggung jawab yang mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan. (Indar Khaerunnisa, 2014)

Menurut (Sedarmayanti, 2012) terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepengemrintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparat pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi : Kepengemrintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan Hukum : Kepengemrintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. (Sedarmayanti, 2012)

Jelas bahwa jumlah komponen atau-pun prinsip yang melandasi tata pemerintah yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu

pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu: 1). Transparansi dan 2). Akuntabilitas, yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Transparansi merupakan penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders*. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Muhammad, 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. (Sedarmayanti, 2012)

Menurut (Darma, 2007) transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.(Sedarmayanti, 2012)

Menurut (Muhammad, 2007) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

(Mardiasmo, 2004) mengartikan akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisa statistika untuk melihat transparansi dan akuntabilitas, alat uji yang digunakan yaitu uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak, teknik analisis meliputi uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi konstruk atau

variabel penelitian, daftar pustaka dan metode *survey*, yaitu kegiatan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai fakta-fakta yang merupakan pendukung terhadap penelitian, untuk menganalisis transparansi dengan akuntabilitas dari *good governance* yang diolah menggunakan perangkat lunak SPSS (Sugiyono, 2010)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Transparansi (T)

Dari output SPSS bahwa untuk variabel Transparansi menunjukkan bahwa : Rata-rata (Mean) = 118.24532 ; Median = 119.15200 ; Modus = 111.016; Deviasi standar = 11.742036; Variance = 137.875; Skewness = 0.013; Kurtosis = 0.934; Range = 57.606; Nilai Minimum data = 90.106 ; Nilai Maksimum data = 147.712. Maka Prinsip Transparansi pada KPP Pratama Cikarang Utara cukup transparans.

#### b. Akuntabilitas (A)

Dari output SPSS menunjukkan variabel Akuntabilitas : Rata-rata (Mean) = 110.811 ; median = 113.124; Modus = 109.153; Deviasi standar = 13.270 ; Variance = 176.112; Skewness = -0.98; Kurtosis = 0.373; Range = 51.938 ; Nilai Minimum data = 85.298 ; Nilai Maksimum data = 137.236.

#### Uji Validitas dan Reliabilitas

Mengikuti kaidah statistika parametrik, maka data variabel Transparansi (T) dan Akuntabilitas (A) yang diolah dalam uji validitas dan uji reliabilitas termasuk dalam analisis-analisis selanjutnya adalah data dari variabel-variabel tersebut dalam format skala interval.

#### a. Variabel Transparansi (T)

Berdasarkan uji validitas terhadap variabel penelitian transparansi dengan menggunakan metode momen produk pearson, diperoleh hasil bahwa semua (30 butir) pernyataan yang dituangkan ke dalam instrumen variabel tersebut dikategorikan shahih atau valid ( $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ ). Dengan demikian tak ada butir pernyataan dari variabel transparansi yang dibuang (*drop*). Semua (30 butir) indikator yang diajukan dalam penelitian ini dapat dijadikan indikator pengukur variabel transparansi.

Berdasarkan uji reliabilitas terhadap variabel transparansi, diperoleh nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,857. Oleh karena nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0.250, maka sifat konsistensi pengukuran variabel transparansi yang diajukan dalam penelitian ini dapat dikategorikan handal atau *reliable*.

Tabel. 1. berikut merupakan rekapitulasi hasil analisis uji validitas dan uji reliabilitas terhadap variabel penelitian Transparansi (T).

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  
Transparansi (T)

No. Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1.	0.461	0.250	Valid
2.	0.475	0.250	Valid
3.	0.321	0.250	Valid
4.	0.356	0.250	Valid
5.	0.598	0.250	Valid
6.	0.679	0.250	Valid
7.	0.616	0.250	Valid
8.	0.297	0.250	Valid
9.	0.324	0.250	Valid
10.	0.353	0.250	Valid
11.	0.520	0.250	Valid
12.	0.577	0.250	Valid
13.	0.501	0.250	Valid
14.	0.684	0.250	Valid
15.	0.823	0.250	Valid
16.	0.428	0.250	Valid
17.	0.452	0.250	Valid
18.	0.663	0.250	Valid
19.	0.571	0.250	Valid
20.	0.281	0.250	Valid
21.	0.332	0.250	Valid
22.	0.345	0.250	Valid
23.	0.538	0.250	Valid
24.	0.585	0.250	Valid
25.	0.583	0.250	Valid
26.	0.336	0.250	Valid
27.	0.454	0.250	Valid
28.	0.534	0.250	Valid
29.	0.320	0.250	Valid
30.	0.597	0.250	Valid
Nilai Alpha Cronbach = 0.857 >			Handal / reliabel 0.250

Sumber: Hasil pengolahan data 2013

Hasil komputasi  $r_{hitung}$  dan nilai *Alpha Cronbach* variabel Transparansi (T).

#### 1. Akuntabilitas

Berdasarkan uji validitas terhadap variabel penelitian Akuntabilitas (A) dengan menggunakan metode Momen Produk Pearson, diperoleh hasil bahwa semua (30 butir) pernyataan yang dituangkan ke dalam instrumen variabel tersebut dikategorikan shahih/valid jika ( $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ ). Dengan demikian tak ada butir pernyataan dari variabel Akuntabilitas (A) yang dibuang (*drop*). Semua (30 butir) indikator yang diajukan dalam penelitian ini dapat dijadikan indikator pengukur variabel Akuntabilitas (A).

Berdasarkan uji reliabilitas terhadap variabel Akuntabilitas (A), diperoleh nilai *Alpha Cronbach*

sebesar 0,895. Oleh karena nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0,250, maka sifat konsistensi pengukuran variabel Akuntabilitas yang diajukan dalam penelitian ini dapat dikategorikan handal atau reliable.

Tabel 2. berikut merupakan rekapitulasi hasil analisis uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel Akuntabilitas (A).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Akuntabilitas

No. Pernyataan	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	0.355	0.250	Valid
2	0.871	0.250	Valid
3	0.735	0.250	Valid
4	0.795	0.250	Valid
5	0.795	0.250	Valid
6	0.676	0.250	Valid
7	0.477	0.250	Valid
8	0.886	0.250	Valid
9	0.534	0.250	Valid
10	0.334	0.250	Valid
11	0.280	0.250	Valid
12	0.631	0.250	Valid
13	0.273	0.250	Valid
14	0.766	0.250	Valid
15	0.706	0.250	Valid
16	0.725	0.250	Valid
17	0.745	0.250	Valid
18	0.297	0.250	Valid
19	0.273	0.250	Valid
20	0.609	0.250	Valid
21	0.313	0.250	Valid
22	0.318	0.250	Valid
23	0.287	0.250	Valid
24	0.383	0.250	Valid
25	0.772	0.250	Valid
26	0.809	0.250	Valid
27	0.678	0.250	Valid
28	0.618	0.250	Valid
29	0.406	0.250	Valid
30	0.856	0.250	Valid
Nilai Alpha Cronbach = 0.895 > 0.250			Handal / reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data 2013

Hasil komputasi r<sub>hitung</sub> dan nilai Alpha Cronbach variabel Akuntabilitas.

#### A. Uji kolmogorov Transparansi

Hasil uji Kolmogorov dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Uji kolmogorov Transparansi

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
T	85	118.24532	11.742036	90.106	147.712

Sumber: Hasil pengolahan data 2013

Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		T
N		85
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	118.24532
	Std. Deviation	11.742036
atau Most Extreme Differences	Absolute	.209
	Positive	.209
	Negative	-.187
Kolmogorov-Smirnov Z		1.931
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil pengolahan data 2013

Analisis :

1. Jika probabilitas > 0.05, maka H<sub>0</sub> diterima
2. Jika probabilitas < 0.05, maka H<sub>0</sub> ditolak

Terlihat bahwa pada kolom asymp.sig / asymptotic significance dua sisi adalah 0.062, atau probabilitas diatas 0.05 ( 0.062 > 0.05 ). Maka H<sub>0</sub> diterima atau distribusi populasi tersebut adalah normal.

#### B. Uji Kolmogorov Akuntabilitas

Hasil uji Kolmogorov dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5. Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
A	85	110.81136	13.270714	85.298	137.236

Sumber: Hasil pengolahan data 2013

Tabel 6. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

A	
N	85
Mean	110.81136

Tabel 5. Descriptive Statistics

N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Normal Parameters <sup>a</sup> , Std. Deviation <sup>b</sup>				13.270714
Most Extreme Differences	Absolute			.177
	Positive			.171
	Negative			-.177
Kolmogorov-Smirnov Z				1.632
Asymp. Sig. (2-tailed)				.061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil pengolahan data 2013

Analisis :

1. Jika probabilitas  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima
  2. Jika probabilitas  $< 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak
- Terlihat bahwa pada kolom asymp.sig/asymptotit significance dua sisi adalah 0.061, atau probabilitas diatas 0.05 (  $0.061 > 0.05$  ). Maka  $H_0$  diterima atau distribusi populasi tersebut adalah normal.

### C. Uji Homogenitas Data

Hasil uji Homogenitas data dapat diketahui dari table sebagai berikut:

Tabel 7. Test of Homogeneity of Variances antara variable Transparansi dengan variable Akuntabilitas

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
1.726 <sup>a</sup>	12	69	.080

a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for A.

Sumber: Hasil pengolahan data 2013

Analisis: Nilai Signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0.05$ , data berasal dari populasi yang mempunyai varians tidak sama. Nilai Signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0.05$ , data berasal dari populasi yang mempunyai varians yang sama Pada Levene Statistic didapat tingkat signifikansi atau nilai probabilitas diatas 0.05  $0.080 > 0.05$ , maka dapat dikatakan data berasal dari populasi yang mempunyai varians yang sama.

### D. Uji Heteroskedasitas

Hasil pengujian Heteroskedasitas dapat diketahui dari table sebagai berikut:

Tabel 8. Correlations

	T	R	A	
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1.000	.091	-.034
	Sig. (2-tailed)		.407	.754
	N	85	85	85
A	Correlation Coefficient	-.034	.172	1.000
	Sig. (2-tailed)	.754	.115	
	N	85	85	85

Sumber: Hasil pengolahan data 2013

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

### E. Uji Multikolinearitas

Tabel 9. Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
T	.949	1.054

a. Variable: A

Sumber: Hasil pengolahan data 2013

Analisis :

Dalam penelitian untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah melihat dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*, dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi. Terlihat pada table diatas nilai tolerance adalah 0.949 dan nilai variance inflation factor (VIF) adalah 1.054 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variable bebas.

## Pengujian Hipotesis

### A. Uji Regresi Berganda

#### 1. Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil pengolahan data menunjukkan:

Tabel 10. Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A	110.81136	23.270714	85
T	118.24532	11.742036	85

Sumber: Hasil pengolahan data 2013

Tabel 11. ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	79.708	1	79.708	.450	.504 <sup>a</sup>
	Residual	14713.688	83	177.273		
	Total	14793.396	84			

a. Predictors: (Constant), T

b. Variable: A

Sumber: Hasil pengolahan data 2013

Hasil pengujian hipotesis berdasarkan data diatas memberikan nilai statistics F = 0,450 menunjukkan variable transparansi dan akuntabilitas cukup baik .

## IV. KESIMPULAN

Dari data diatas dapat disimpulkan *good corporate governance* atau prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sudah dilaksanakan pada KPP Pratama Cikarang Utara, pada prinsip transparansi sangat diperlukan dalam prosedur administrasi maupun publikasi pada kantor pemerintahan begitu juga dengan akuntabilitas pada kenyataannya berdasarkan penelitian ini sesuai hasil data statistic menyatakan walaupun transparansi sudah dijalankan tetapi hasil pengujian hipotesis menjawab bahwa transparansi dan akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara cukup baik.

## REFERENSI

- CUI-ITB. (2004). Keterkaitan Akuntabilitas Dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 15, 34–47. Retrieved from <http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4275>
- Darma, S. (2007). *Manajemen Keuangan Sekolah Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Departemen Pendidikan Nasional.*
- Indar Khaerunnisa, A. W. (2014). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 1, 211–224. Retrieved from <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/80>
- Kaihatu. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8, 1–9. Retrieved from <http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/16505/16497>
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad, H. (2007). *Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 3, 45–75.
- Sadhani, D. (2005). No Title. *Article Pajak*. Retrieved from [www.PajakOnline.com](http://www.PajakOnline.com)
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi Revisi*. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sutedjo. (n.d.). *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah*. Universitas Diponegoro.

## BIODATA PENULIS

Aprilia Puspasari (2019) Prinsip-prinsip Good Governance Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara, *Jurnal Perspektif*. Dosen UBSI Cikarang, Karawang, Cibitung.